

# Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau dan Kabupaten Buton

Sri Sumantri<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

---

## ABSTRACT

---

*This study aims to determine and explain the performance of PDAM Baubau City and PDAM Buton Regency based on the Decree of the Minister of Home Affairs No. 47 of 1999, as well as to compare which PDAMs have better performance (PDAM Baubau City or PDAM Kabupaten Buton) for the 2018-2019 period. Financial performance is measured by profitability ratios, liquidity ratios, and solvency ratios. This study uses secondary data from the financial statements of water companies in Baubau City and Buton Regency in 2018-2019. The data analysis technique used is an analysis with a comparative method, which is to compare the results of the financial performance of PDAM Kota Baubau and PDAM Kabupaten Buton based on the Decree of the Minister of Home Affairs No. 47 of 1999. This study shows that the financial performance of PDAM Baubau City and Wakatobi Regency for the last 2 years (2018-2019) which, if associated with the Decree of the Minister of Home Affairs No. 47 of 1999, the financial performance aspects of these two companies are included in the poor category.*

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja PDAM Kota Baubau dan PDAM Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No. 47 tahun 1999, serta untuk membandingkan PDAM mana yang memiliki kinerja yang lebih baik (PDAM Kota Baubau atau PDAM Kabupaten Buton) periode 2018-2019. Kinerja keuangan diukur dengan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan perusahaan Air Minum Kota Baubau dan Kabupaten Buton tahun 2018-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dengan metode perbandingan yaitu membandingkan hasil kinerja keuangan PDAM Kota Baubau dan PDAM Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PDAM Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi selama 2 tahun terakhir (2018-2019) yang jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999, maka aspek kinerja keuangan kedua perusahaan ini termasuk dalam kategori kurang.

### Keywords:

*Activity Ratio; Financial Statements; Liquidity Ratio; Profitability Ratio; Solvency Ratio*

---

\* Corresponding Author at Program Studi Akuntansi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93711, Indonesia.  
E-mail address: [sumanti.sri@gmail.com](mailto:sumanti.sri@gmail.com) (author#1)

## 1. Pendahuluan

Air merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia untuk kelangsungan hidupnya dan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kesehatan dan pengembangan perekonomiannya. Mahdi S. (2000) menyampaikan bahwa, visi air dunia menjadikan air sebagai urusan setiap orang, krisis air dunia karena ketidakmampuan mengelola, visi air Asean, keberlanjutan sumber daya alam, kecukupan kuantitas dan kualitas untuk kesehatan, keamanan, kesediaan pangan, kehidupan ekonomi dan lingkungan hidup, visi air Indonesia terwujudnya kemanfaatan air bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah berwenang untuk mengelola sumber regional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayanan air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah instansi. Dalam hal ini instansi yang menangani adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PDAM Kota Baubau dan Kabupaten Buton merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih. Salah satu tujuan dibentuknya PDAM adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih, sedang tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi daerah. PDAM Kota Baubau dan Kabupaten Buton sebagai salah satu BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang memadai. Hanya perusahaan yang memiliki keunggulan pada tingkat global yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu menghasilkan produk yang bermutu serta cost effective (Mulyadi, 2001).

Penilaian atau evaluasi terhadap kinerja keuangan PDAM dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan berdasarkan SK. Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 tentang pedoman penilaian Kinerja PDAM. Penilaian tersebut meliputi penilaian kinerja aspek korporasi dan aspek kinerja manajemen yang ditentukan oleh hasil penilaian terhadap kinerja aspek keuangan, aspek operasional, dan manfaat bagi masyarakat. Penilaian aspek kinerja korporasi mencakup penilaian kinerja aspek keuangan dan kinerja operasional. Sedangkan kinerja manajemen mencakup penilaian kinerja korporasi dan manfaat bagi masyarakat.

Kondisi yang menjadi masalah besar bagi PDAM saat sekarang adalah bahwa PDAM sejak didirikannya hingga sekarang tidak pernah mengalami keuntungan, yang terjadi justru kerugian. Hal ini terjadi hampir di semua PDAM yang ada di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini PDAM Kota Baubau DAN PDAM Kabupaten Buton.

## 2. Literature Review

### 2.1. Analisis Laporan Keuangan

Analisis keuangan mencakup penelaahan hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis keuangan diperlukan oleh berbagai pihak seperti para pemegang saham atau investor, kreditor, dan manajer karena melalui analisis keuangan ini mereka akan mengetahui posisi perusahaan yang bersangkutan dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam satu kelompok industri.

Ada tiga macam alat analisis keuangan yang umumnya digunakan yakni:

1. Analisis horizontal, dimana melalui analisis ini kita mencoba melihat perkembangan berbagai perkiraan yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi dari tahun ketahun.
2. Analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung suatu trend. Pos-pos dalam neraca dengan satu jumlah tertentu dari neraca
3. Analisis rasio adalah suatu rumusan secara matematis dari hubungan/korelasi, antara suatu jumlah tertentu lainnya.

Analisis rasio terdapat empat kelompok rasio keuangan yaitu:

#### 1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek, artinya apabila perusahaan diitagih, maka akan mampu untuk memenuhi (membayar) hutang tersebut hutang yang sudah jatuh tempo.

- a) Rasio lancar (*current rasio*) yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang di miliki.
- b) Rasio Cepat/Quick Ratio Rasio ini dihitung dengan mengurangi persediaan dari aktiva lancar, dan kemudian membagi hasilnya dengan kewajiban lancar.

#### 2. Rasio solvabilitas (*leverage*)

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan likuidasi.

- a) *Total debt to total assets ratio*, mengukur presentasi besarnya dana yang berasal dari hutang.
- b) *Debt to equiti ratio*, imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri.

### 3. Rasio rentabilitas

Rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba.

- a) Profit margin yaitu menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.
- b) Gross profit margin merupakan perbandingan antara laba kotor yang di peroleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang di capai pada periode yang sama.
- c) Net profit margin adalah laba bersih yang digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang di hasilkan.
- d) Return on investasi (ROI) merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang dinakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan.
- e) Return on asset merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

### 4. Rasio aktivitas

Rasio aktivitas ini melihat pada beberapa asset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu.

- a) Perputaran piutang. Rasio ini mengukur berapa kali, secara rata rata piutang yang dikumpulkan dalam satu tahun.
- b) Perputaran aktiva tetap. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.
- c) Perputaran persediaan. Seperti halnya dengan perputaran piutang, rasio ini jua menggambarkan likuiditas perusahaan.
- d) Perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva merupakan ukuran efektivitas pemamfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan.

## 2.2. Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan

dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian dan proses transaksional seperti merger, akuisisi dan emisi saham. Melalui penilaian, perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya, menetapkan balas jasa internal dan menentukan harga saham secara wajar. Penilaian kinerja dalam suatu perusahaan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Masing-masing pihak yang berkepentingan memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Meskipun demikian penilaian kinerja merupakan suatu penentuan secara periodik mengenai efektifitas operasional dari perusahaan yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif menurut Abd Rahman (2012).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengukur kinerja perusahaan, perusahaan harus mengevaluasi efektifitas, efisien dan aktivitas perusahaan dalam satu periode.

Kinerja pada suatu perusahaan sebenarnya adalah aktivitas dalam melakukan pekerjaan apapun sesuai tugas masing-masing karyawan, Jenis-jenis kinerja keuangan itu bagaimana memberdayakan sesuatu untuk dapat menghasilkan sesuatu barang dan jasa.

Kinerja keuangan dapat dilihat dari perbandingan melalui perbandingan rasio-rasio berikut:

1. Ratio likuiditas adalah ratio yang dimaksud mengukur likwiditas perusahaan (Current ratio, acid test ratio)
2. Ratio leverage adalah ratio yang dimaksud untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutangnya (Debt to total Assets ratio, Net worth to debt ratio dan lain-lain).
3. Ratio aktivitas yaitu ratio yang dimaksud untuk mengukur sampai seberapa besar efektifitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya (Inventory turnover, Average collection period dan lain-lain).
4. Ratio profitabilitas yaitu yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan (profit margin on sales, Return on total Assets, Return on net worth dan lain-lain). Ratio satu dan dua disebut sebagai balance sheet ratio, yang ketiga dikenal dengan istilah inter statement ratio sedangkan yang keempat dikenal dengan income statement ratio.

## **5. Metode, Data, dan Analisis**

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan data Kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan PDAM Kota Baubau dan PDAM Kabupaten Buton, dan data kuantitatif yaitu analisis dengan menampilkan perhitungan angka-angka dalam bentuk tabel-tabel.

Sumber data yaitu data Primer yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan atau direksi perusahaan, dan data Sekunder yakni data yang diperoleh dari tempat penelitian meliputi data yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Tentunya data ini berkaitan dengan lembaga dan yang berhubungan laporan keuangan kedua perusahaan daerah air minum ini.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis dengan metode perbandingan yaitu membandingkan hasil kinerja keuangan PDAM Kota Bau-Bau dan PDAM Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999.

## 6. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada PDAM Kota Baubau dan PDAM Kabupaten Buton Tahun 2018-2019. Penilaian Kinerja Keuangan ini dilakukan dengan menggunakan standar Kinerja berdasarkan SK.Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM, dengan penekanan hanya pada aspek keuangannya saja dengan bobot 45 atas dasar data tahun 2018 dan 2019, dengan aspek keuangan sebagai berikut:

### 6.1. Kinerja Keuangan PDAM Kota Baubau

#### **Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif (RL thdp AP)**

**Table 1.** Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif

Tahun	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Aktiva Produktif	Rasio	Nilai peraturan Mendagri No. 47 1999
2018	(772,602,500.01)	11,452,728,459.00	(6.75)	1
2019	(668,767,016.94)	12,688,382,402.00	(5.27)	1

Source: Data diolah Dari Penulis

Berdasarkan hasil perhitungan rasio laba terhadap aktiva produktif terlihat bahwa rasio terhitung selama 2 tahun berturut-turut adalah -6,75 (2018), dan -5.27 (2019). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut jika dibandingkan dengan SK. Mendagri, apabila Rasio laba terhadap aktiva Produktif sebesar 0% maka bobot nilainya masing-masing sebesar 1 (2018-2019), sedangkan nilai maksimal untuk Rasio ini sebesar 5. Dengan demikian PDAM Kota Baubau untuk Rasio ini baru mencapai bobot 20% dari nilai optimal yang disyaratkan.

#### **Rasio Laba Terhadap Penjualan**

**Table 2.** Rasio Laba terhadap Penjualan

Tahun	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Aktiva Produktif	Rasio	Nilai peraturan Mendagri No. 47 1999
2018	(772,602,500.01)	3,674,345,611.73	(0.21)	1
2019	(668,767,016.94)	6,361,416,068.00	(0.11)	1

Source: Data diolah Dari Penulis

Hasil perhitungan Rasio Laba terhadap penjualan untuk tahun tahun 2018 sebesar -0.21 dan tahun 2019 sebesar -0.11. Sesuai SK Mendagri, apabila Rasio Laba terhadap penjualan sebesar 0%, maka memperoleh nilai masing-masing sebesar 1, sedangkan nilai maksimal untuk Rasio ini sebesar 5. Dengan demikian PDAM Kota Baubau untuk Rasio ini untuk masing-masing tahun mencapai bobot 20% dari nilai optimal yang disyaratkan (tahun 2018 – 2019).

#### **Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar (Rasio AL Terhadap UL)**

**Table 3.** Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar

Tahun	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Aktiva Produktif	Rasio	Nilai peraturan Mendagri No. 47 1999
2018	2,196,739,446.56	3,721,066,752.93	0.59	1
2019	3,435,923,896.03	7,652,346,077.65	0.45	1

Source: Data diolah Dari Penulis

Hasil perhitungan Rasio Aktiva Lancar terhadap utang lancar adalah tahun 2018 sebesar 0.59 dan tahun 2019 sebesar 0.45. Berdasarkan SK.Mendagri, apabila Rasio Aktiva Lancar terhadap utang lancar sebesar kurang dari 1 maka diperoleh nilai sebesar 1 (satu). Dengan demikian rasio untuk masing-masing tahun adalah 1 (satu). Sedangkan nilai maksimal untuk Rasio ini sebesar 5. Dengan memperoleh nilai 1 berarti PDAM Kota Baubau baru mencapai bobot rasio ini sebesar 20 % dari nilai optimal yang disyaratkan (tahun 2018 – 2019).

#### **Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang**

**Table 4.** Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang

Tahun	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Aktiva Produktif	Rasio	Nilai peraturan Mendagri No. 47 1999
2018	11,463,680,615.85	8,435,395,049.56	1.36	3
2019	12,728,772,334.07	11,397,365,212.65	1.12	2

---

Source: Data diolah Dari Penulis

Hasil perhitungan Rasio total aktiva terhadap total utang menunjukkan bahwa untuk tahun 2018 sebesar 1,36 dan tahun 2019 sebesar 1.12. Jika dibandingkan dengan SK. Mendagri No. 47 tahun 1999 maka nilai untuk tahun 2018 nilai rasionya adalah 3 (rasio 1.3), dengan demikian bobot untuk tahun 2018 adalah 60%, sedangkan untuk tahun 2019 nilai rasionya adalah 2 (rasio 1.1) yang berarti bahwa bobot untuk tahun 2019 adalah 40%.

### *6.2. Pembahasan Hasil Analisis Kinerja Keuangan PDAM Kota Baubau*

Dilihat dari rasio Profitabilitasnya (Tabel 1 dan Tabel 2) menunjukkan bahwa nilai rasio yang diperoleh bila dibandingkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999 dari tahun 2018 sampai tahun 2019 adalah kategori kurang. Seperti kita lihat nilai rasio profitabilitas yang diperoleh (tabel 1) menunjukkan rasio profitabilitas yang negatif yang menunjukkan bahwa PDAM Kota Baubau dari tahun 2018 – 2019 tidak mendapatkan keuntungan. Ini berarti bahwa margin laba merupakan keuntungan penjualan setelah dihitung seluruh biaya setelah pajak penghasilan. Margin ini merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan (Martono, 2009).

Dilihat dari rasio likuiditas (Tabel 3) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, ternyata nilai yang telah diperoleh adalah tidak baik. Jika dikaitkan dengan teori maka hal ini terbukti bahwa dari tahun ke tahun rasio keuangannya semakin menurun sehingga dikatakan perusahaan akan likuid apabila tidak mampu melunasi finansial kewajiban jangka pendeknya dan rasio yang tunggakan yang berpengaruh negatif terhadap kemampuan memperoleh laba (rentabilitas) dengan asumsi bahwa tidak ada standar khusus untuk menentukan berapa besarnya nilai rasio yang paling baik, namun dalam prinsip kehati-hatian besarnya sekitar 200% (Martono, 2009).

Dilihat dari Solvabilitas (Tabel 4) menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2019 bahwa nilai rasio yang diperoleh dalam kategori tidak baik jika dikaitkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999. Bila dikaitkan dengan teori dan menunjukkan nilai rasio yang tinggi akan mengindikasikan rendahnya tingkat likuiditas, sedangkan rasio yang rendah akan mengindikasikan tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga dalam hasil penelitian dikatakan tidak mendukung karena diperoleh nilai rasio yang tinggi sehingga apabila solvabilitas menghasilkan angka 5 artinya setiap Rp. 1,- hutang perusahaan dijamin oleh Rp. 5,- kekekayaan yang dimiliki perusahaan (Sutrisno, 2009).

### *6.3. Kinerja Keuangan PDAM Kabupaten Buton*

#### **Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif (RL thdp AP)**

**Table 5.** Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif

Tahun	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Aktiva Produktif	Rasio	Nilai peraturan Mendagri No. 47 1999
2018	(653,025,298.00)	4,201,359,821.00	(15.54)	1
2019	(1,726,990,043.87)	12,471,923,704.69	(13.85)	1

Source: Data diolah Dari Penulis

Berdasarkan hasil perhitungan rasio laba terhadap aktiva produktif terlihat bahwa rasio terhitung selama 2 tahun berturut-turut -15,54 (2018) dan -13.85 (2019). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut jika dibandingkan dengan SK. Mendagri, apabila Rasio laba terhadap aktiva Produktif sebesar  $\geq 0\%$  maka bobot nilainya masing-masing sebesar 1 (2018-2019), sedangkan nilai maksimal untuk Rasio ini sebesar 5. Dengan demikian PDAM Kabupaten Buton untuk Rasio ini baru mencapai bobot 20% dari nilai optimal yang disyaratkan.

#### **Rasio Laba Terhadap Penjualan**

**Table 6.** Rasio Laba terhadap Penjualan

Tahun	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Aktiva Produktif	Rasio	Nilai peraturan Mendagri No. 47 1999
2018	(653,025,298.00)	696,367,518.00	(0.94)	1
2019	(1,726,990,043.87)	1,405,390,230.00	(1.23)	1

Source: Data diolah Dari Penulis

Hasil perhitungan Rasio Laba terhadap penjualan untuk tahun 2007 -0.94 dan tahun 2010 sebesar -1.23. Sesuai SK Mendagri, apabila Rasio Laba terhadap penjualan sebesar  $\geq 0\%$ , maka memperoleh nilai masing-masing sebesar 1, sedangkan nilai maksimal untuk Rasio ini sebesar 5. Dengan demikian PDAM Kabupaten Buton untuk Rasio ini untuk masing-masing tahun mencapai bobot 20% dari nilai optimal yang disyaratkan (tahun 2018 - 2019).

#### **Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar (Rasio AL Terhadap UL)**

**Table 7.** Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar

Tahun	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Aktiva Produktif	Rasio	Nilai peraturan Mendagri No. 47 1999
2018	316,782,479.00	129,902,506.00	2.44	5

2019	735,354,258.97	793,026,061.71	0.93	1
------	----------------	----------------	------	---

Source: Data diolah Dari Penulis

Hasil perhitungan Rasio Aktiva Lancar terhadap utang lancar adalah tahun 2018 sebesar 2.44 dan tahun 2019 sebesar 0.93. Berdasarkan SK.Mendagri, apabila Rasio Aktiva Lancar terhadap utang lancar untuk 2019 sebesar kurang dari 1 dan lebih dari 3 maka diperoleh nilai sebesar 1 (satu). Dengan demikian rasio untuk tahun 2019 adalah 1 (satu), sehingga bobot untuk tahun 2019 sebesar 20 % dari nilai optimal yang disyaratkan. Sedangkan untuk tahun 2018 berada pada rasio 2.44 sehingga nilainya adalah 5 (100%).

#### **Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang**

**Table 8.** Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang

Tahun	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Aktiva Produktif	Rasio	Nilai peraturan Mendagri No. 47 1999
2018	4,201,359,821.00	1,357,760,281.00	3.09	5
2019	12,471,923,704.69	2,138,847,494.71	5.83	5

Source: Data diolah Dari Penulis

Hasil perhitungan Rasio total aktiva terhadap total utang menunjukkan bahwa untuk tahun tahun 2018 sebesar 3,09, dan tahun 2019 sebesar 5.83. Jika dibandingkan dengan SK.Mendagri No. 47 tahun 1999 maka nilai untuk tahun 2018 - 2019 adalah 5 (rasio > 2.0) berarti rasio mencapai rasio maksimum yakni 100%.

#### **6.4. Pembahasan Hasil Analisis Kinerja Keuangan PDAM Kabupaten Buton**

Dilihat dari rasio Profitabilitasnya (Tabel 5) menunjukkan bahwa nilai rasio yang diperoleh bila dibandingkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999 dari tahun 2006 sampai tahun 2010 adalah kategori kurang baik. Seperti kita lihat nilai rasio profitabilitas yang diperoleh (tabel 5 dan 6) menunjukkan rasio profitabilitas yang negatif yang menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten Buton dari tahun 2018 - 2019 tidak mendapatkan keuntungan. Ini berarti bahwa margin laba merupakan keuntungan penjualan setelah dihitung seluruh biaya setelah pajak penghasilan. Margin ini merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan (Martono, 2009).

Dilihat dari rasio likuiditas (Tabel 7) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, ternyata nilai yang telah diperoleh berfluktuasi dari yang kurang sampai sangat baik baik. Jika dikaitkan dengan

teori maka hal ini terbukti bahwa dari tahun ke tahun rasio keuangannya mengalami kenaikan sehingga perlahan-lahan PDAM Buton melunasi kewajiban jangka pendeknya dan rasio yang tunggakan yang berpengaruh negatif terhadap kemampuan memperoleh laba (rentabilitas) dengan asumsi bahwa tidak ada standar khusus untuk menentukan berapa besarnya nilai rasio yang paling baik, namun dalam prinsip kehati-hatian besarnya sekitar 200% (Martono, 2009).

Dilihat dari Solvabilitas (Tabel 8) menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2019 bahwa nilai rasio yang diperoleh dalam kategori sangat jika dikaitkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999. Bila dikaitkan dengan teori dan menunjukkan nilai rasio yang tinggi akan mengindikasikan rendahnya tingkat likuiditas, sedangkan rasio yang rendah akan mengindikasikan tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga dalam hasil penelitian dikatakan tidak mendukung karena diperoleh nilai rasio yang tinggi sehingga apabila solvabilitas menghasilkan angka 5 artinya setiap Rp. 1,- hutang perusahaan dijamin oleh Rp. 5,- kekayaan yang dimiliki perusahaan (Sutrisno, 2009).

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka sebagai kesimpulan bahwa kinerja keuangan PDAM Kota Baubau selama 2 tahun terakhir (2018 – 2019) yang jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999, maka aspek kinerja keuangan PDAM Kota Baubau dan PDAM Kabupaten Buton termasuk dalam kategori kurang. Jika dibandingkan aspek kinerja keuangan PDAM Kota Baubau dengan PDAM Kabupaten Buton, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999, maka PDAM Kabupaten Buton lebih baik kinerja keuangannya daripada PDAM Kota Baubau.

Hal ini dapat dilihat dari kinerja keuangan untuk Kabupaten Wajo pada Tahun 2018 dan 2019 berkategori cukup serta nilai kinerja rata-rata selama 2 tahun sebesar 42.7 sedangkan nilai rata-rata kinerja keuangan PDAM Kota Baubau hanya sebesar 34.3 Ini berarti bahwa PDAM Kabupaten Buton lebih efektif dan lebih efisien mengelola asset-aset perusahaannya dan investasinya terhadap penjualan dan akan lebih sedikit kerugian yang dialami perusahaan tersebut dibandingkan dengan PDAM Kota Baubau.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa kondisi yang masih perlu untuk dilakukan perbaikan sehingga penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengurangi biaya operasional dan peningkatan pengelolaan piutang untuk meningkatkan kemampuan profitabilitas perusahaan. Karena dengan cara ini minimal dapat ditingkatkan rasio laba dan rasio penagihan piutang.

2. Memanage modal kerja yang mengacu kepada penataan semua aspek aktiva lancar dan utang lancar untuk meningkatkan likuiditas perusahaan.
3. Meningkatkan volume bisnis sesuai kapasitas dan bidang usaha dimiliki perusahaan. Dengan cara ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan laba.

### Referensi

- Anonim, 1994. Modul Penyiapan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001. Panduan Evaluasi Kinerja P3KT. Dirjen Cipta Karya Jakarta.
- Altman, edward I, Corporate Financial Distress; A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Daeling with Bankruptcy, New York; Wiley-Interscience Publication, 1983.
- Foster, George, Financial Statement Analysis, Second Edition, Practice-Hall, New Jersey, USA.
- Garrison Ray H dan Noreen Eric W, Managerial Accounting; Concepts for Planning, Control, Decision, Making, Sevent Edition, Richard D. Irwin, Inc, USA.
- Hasibuan H.NM.S.P, 2001. Manajemen Sumberdaya Manusia, Bumi Aksara Jakarta.
- Kaplan Roberts S, & Norton David P., The Balanced Scorecard; Translating Strategy Into Action, Harvard Business School, Press, Boston, Massachusets, USA.
- Keown, Arthur J. 1996, Basic Financial Management, New Jersey Prentice-Hall, 1996.
- Mahdi. S, 2000. Forum Air Departemen Kimpraswil. Jakarta.
- Martono, SU, Harjito, D.A., 2003. Manajemen Keuangan, Penerbit Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Maslow A, 1984. Motivasi dan Kepribadian, Teori Motivasi dengan Ancang Hirarki Kebutuhan Manusia. Terjemahan PT. Pustaka Biman Presindo. Jakarta.
- Mustopadidjaya AR., 2000. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. Penerbit LAN. Jakarta.
- Nick Devas. 1992. "Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia' Penerbit Universitas Indoensia , Jakarta.
- Rukmana, N. 1993. Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan, LP3S, Jakarta.
- Sawir, Agnes, 2001. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan", PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001.
- Salas, 1985. Masa Depan Perkotaan dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alfabeta, Bandung.

Sutojo, Siswanto, "Mengenali Arti dan Penggunaan Neraca Perusahaan". PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000.

Tjokroamidjojo B, 2001. *Good Governance / Pradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Cetakan Kedua. ISBN Jakarta.

Umar. H, 2003, *Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Weston, J. Fred; Copeland, Thomas E, *Managerial Financial*, New York; CBS College Publishing, 1994. Alih Bahasa Jaka Wasana dan Kirbrandoko.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

SK. Menkes R.I. No. : 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Air Minum.